

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan sampel Wajib Pajak pribadi yang dilakukan di KPP Pratama Taman Sari Dua, Jakarta Barat. Data yang dijadikan pengamatan sebanyak 87 responden dengan menggunakan teknik *Convenience Sampling*.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Taman Sari Dua tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terlihat dari tabel 4.13 hasil uji t variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki nilai  $t = -0,585$  dengan probabilitas signifikan sebesar 0,560. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai modernisasi penerapan sistem administrasi perpajakan tersebut, dimana model KPP Pratama baru dikembangkan tahun 2002. Dan masih rendahnya penggunaan teknologi internet oleh wajib pajak, yang terlihat masih banyaknya Wajib Pajak yang mendatangi langsung KPP untuk menyetor kembali SPT atau membayar pajak terutangnya.

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Taman Sari Dua. Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t variabel pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan memiliki nilai  $t = 4,356$  dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan di KPP ini sudah cukup baik, tentang wajbnya kepemilikan NPWP jika mempunyai penghasilan sendiri, tentang hak dan kewajiban perpajakan, tentang sanksi jika melakukan pelanggaran pajak, tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku saat ini, tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi atau training.
3. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Taman Sari Dua. Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t variabel Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki nilai  $t = 3,278$  dengan probabilitas signifikan sebesar 0,002. Berbagai tingkat dari pendidikan yang diperoleh Wajib Pajak di KPP ini. Diketahui Wajib Pajak lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan akhir di SMA daripada D3 atau S1, karena wajib pajak yang ditemui peneliti sebagian besar adalah pekerja yang menyetorkan kembali SPT dari karyawan-karyawan di perusahaannya.
4. Secara bersama-sama atau simultan, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga variabel bebas ini dapat

menerangkan sebesar 26,97% dari Kepatuhan Wajib Pajak. Terlihat dari tabel 4.14 uji pengaruh simultan (F-test) sebesar 26,976 dan signifikansi sebesar 0.000. Semakin tinggi tingkat pendidikan memungkinkan semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, terlebih wajib pajak memilih jurusan yang mempelajari pajak lebih khusus. Dengan begitu wajib pajak juga akan mengerti cara kerja dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Ketiga variabel tersebut secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalani kewajiban perpajakannya.

## **5.2 Keterbatasan**

Dalam melakukan penelitian, penulis menghadapi keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu penelitian dan pengurusan izin yang juga cukup lama sehingga mempersempit waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dalam menyebar kuesioner.
2. Kebanyakan pihak yang melaporkan SPT di loket pelayanan merupakan kurir yang hanya diperintahkan untuk melaporkan SPT sehingga penulis kesulitan untuk memperoleh lebih banyak informasi dari responden yang benar-benar merupakan Wajib Pajak KPP Pratama Taman Sari Dua.
3. Ketidaksediaan Wajib Pajak untuk melakukan pengisian kuesioner dikarenakan kesibukan masing-masing dan keterbatasan waktu.

### 5.3 Saran

Beberapa saran dari penulis untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP):

1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP lebih bisa memperbaiki sistem administrasi perpajakan untuk melakukan reformasi perpajakan di Indonesia yang lebih efisien dan lebih baik lagi, agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seperti melakukan memperbanyak petugas pajak karena masih terdapat loket pembayaran pajak di KPP yang tidak dibuka karena kurang pegawai. Perawatan kantor-kantor pajak agar menciptakan suasana yang nyaman, baik untuk Wajib Pajak juga petugas pajak. Dan memberikan pelatihan untuk petugas pajak agar melayani Wajib Pajak sesuai kebutuhan.
2. Petugas pajak lebih sering melakukan sosialisasi dan training tentang peraturan perpajakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan lebih luas lagi, agar bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat menjalankan kewajibannya.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya :

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mencoba pada KPP lainnya dan variabel-variabel lain yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Jumlah sampel penelitian sebaiknya lebih banyak agar dapat mewakili populasi yang lebih luas dari penelitian ini.